



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SULAWESI TENGGARA

BULETIN EDISI XVIII

11 - 15 MEI TAHUN 2026





PERKUAT SINERGI LINTAS INSTANSI, TIMPORA WAKATOBI FOKUS PENCEGAHAN TPPO/TPPM



Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Ganda Samosir, hadir sebagai narasumber dalam Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Wakatobi Tahun 2026 dengan mengusung tema: "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Orang Asing Melalui Kolaborasi Lintas Instansi di Wilayah Kabupaten Wakatobi."

Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antarinstansi guna meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing, khususnya dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) di wilayah Kabupaten Wakatobi.

Rapat dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Wakatobi, Dra. Hj. Safia Wuolo, serta dimoderatori oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi. Kegiatan turut dihadiri unsur Forkopimda, TNI-Polri, instansi vertikal, OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi, serta berbagai elemen terkait lainnya.



Melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing dapat berjalan optimal demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SINERGI DESA BINAAN: STRATEGI KOMPREHENSIF MELAWAN TPPO DAN TPPM

BAUBAU – Dalam upaya memperketat pengawasan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara melalui jajaran Divisi Keimigrasian melaksanakan koordinasi intensif di wilayah Kota Baubau. Kegiatan yang berlangsung pada 10-13 Mei 2026 ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal, Heru Hartono.



Kehadiran pimpinan dari tingkat wilayah ini menegaskan bahwa penguatan Desa Binaan Imigrasi di Kelurahan Bataraguru, Batulo, dan Bukit Wolio Indah merupakan prioritas strategis dalam menjaga kedaulatan serta keamanan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Koordinasi kali ini memberikan atensi khusus pada pencegahan dua kejahatan transnasional yang kerap saling berkaitan, namun memiliki karakteristik berbeda yang perlu dipahami oleh perangkat kelurahan:

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): Menitikberatkan pada unsur eksploitasi. Masyarakat diberikan edukasi bahwa ancaman sesungguhnya bukan hanya pada proses keberangkatan, melainkan pada kondisi kerja yang tidak manusiawi di negara tujuan. Perangkat kelurahan diminta waspada terhadap pihak luar yang menjanjikan kemudahan dokumen tanpa melalui jalur resmi Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi.

Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM): Menitikberatkan pada penyelundupan lintas batas secara ilegal demi keuntungan materi. Penekanan diberikan pada risiko keselamatan nyawa. Penyelundupan manusia seringkali melibatkan jalur-jalur "tikus" yang tidak resmi, yang menempatkan warga dalam bahaya fisik yang nyata selama perjalanan lintas negara.



Sosialisasi Berkelanjutan: Menjadikan Desa Binaan sebagai pusat informasi di mana masyarakat bisa bertanya langsung mengenai legalitas bekerja di luar negeri tanpa rasa takut.

Dengan turun langsungnya Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal, diharapkan sinergitas antara instansi vertikal dan pemerintah daerah di Kota Baubau semakin solid. Langkah ini merupakan bentuk deteksi dini guna memastikan wilayah Kota Baubau bersih dari praktik-praktik penyalahgunaan dokumen keimigrasian serta melindungi warga dari jerat sindikat internasional.

"Garda Terdepan Penegakan Hukum, Wujudkan Masyarakat Sadar Imigrasi"

AKSELERASI LAYANAN DOKUMEN DAN KEPASTIAN STATUS KEIMIGRASIAN DI KOTA KENDARI

KENDARI – Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pelayanan administrasi hukum, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara melalui jajaran Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian melaksanakan rangkaian koordinasi strategis di Kota Kendari. Kegiatan intensif ini berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 Mei 2026.

Agenda penting ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Firmansyah, guna memastikan setiap dinamika status keimigrasian dan permohonan dokumen perjalanan di wilayah Kendari berjalan selaras dengan regulasi terbaru serta aspek perlindungan masyarakat.

Sinergi di Kementerian Agama dan Penyelenggara Haji & Umrah
Dalam kunjungan ke Kantor Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Kendari, tim memberikan atensi mendalam pada dua poin krusial:



Pemberian Izin Nikah (Kawin Campur): Tim melakukan koordinasi teknis mengenai persyaratan administratif pernikahan antara WNI dan WNA. Penekanan diberikan pada keselarasan antara dokumen pernikahan dengan masa berlaku izin tinggal warga negara asing untuk mencegah penyalahgunaan status keimigrasian di wilayah Kota Kendari.

Mitigasi TPPO & TPPM pada Sektor Haji/Umrah: Koordinasi dengan pihak penyelenggara Haji dan Umrah difokuskan pada pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) yang bermoduskan perjalanan ibadah. Tim menekankan pentingnya verifikasi ketat terhadap dokumen perjalanan agar jemaah terhindar dari praktik ilegal yang membahayakan keselamatan dan status hukum mereka di luar negeri.

Integrasi Data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Langkah strategis dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kendari untuk memperkuat validitas data subjek hukum keimigrasian:

Status Kewarganegaraan Ganda: Verifikasi terhadap subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas agar tetap patuh secara administrasi dalam pelaporan status keimigrasiannya.

Validasi Dokumen Orang Asing: Sinkronisasi data kependudukan bagi orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maupun Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang berdomisili di Kendari demi terwujudnya keakuratan data pemerintah yang terintegrasi.

Tim menegaskan bahwa rangkaian koordinasi selama tiga hari ini merupakan upaya preventif dalam melindungi warga negara sekaligus memberikan kepastian hukum bagi orang asing yang tinggal di Kendari. Dengan kolaborasi yang solid antara Imigrasi, Kemenag, Kementerian Haji dan Umrah, dan Disdukcapil, diharapkan tercipta ekosistem pelayanan publik yang aman, transparan, dan akuntabel.

IMIGRASI SULTRA PERKUAT PENGAWASAN DAN STABILITAS DAERAH LEWAT RAKOR KOMINDA



Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sultra hadir langsung dalam Rapat Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Sulawesi Tenggara sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Bumi Bahteramas.

Dalam forum strategis tersebut, Kakanwil menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas orang asing guna mendukung terciptanya situasi daerah yang aman, tertib, dan kondusif.



PERKUAT PENGAWASAN KEIMIGRASIAN SELAMA LIBUR PANJANG, TIM LAKSANAKAN MONITORING WNA DI SEJUMLAH PENGINAPAN KOTA BAUBAU

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang penegakan hukum dan kepatutan internal, telah dilaksanakan pengawasan keimigrasian di sejumlah hotel dan penginapan di Kota Baubau pada tanggal 13–16 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing selama periode libur panjang.

Pengawasan dilaksanakan di beberapa lokasi, antara lain Villa Kasim, Green Homestay Syariah, dan Hotel Zenith. Dari hasil kegiatan tersebut, ditemukan adanya warga negara Korea Selatan yang sedang menginap di Green Homestay Syariah dan diketahui memiliki lembaga kursus di Kota Baubau. Sementara itu, pihak Villa Kasim menyampaikan bahwa terdapat pemesanan penginapan oleh warga negara asing yang dijadwalkan akan menginap pada bulan Juni mendatang.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Kota Baubau dapat berjalan optimal guna mendukung terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.



PATROLI KEIMIGRASIAN DI KOTA BAUBAU DAN BUTON SELATAN PERKUAT PENGAWASAN ORANG ASING SELAMA LIBUR PANJANG



Dalam rangka meningkatkan pengawasan keimigrasian selama periode libur panjang, telah dilaksanakan kegiatan Patroli Keimigrasian di wilayah Kota Baubau dan Kabupaten Buton Selatan pada tanggal 13–16 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah kerja.

Patroli dilaksanakan di sejumlah titik pemantauan, antara lain Desa Lampanairi, Nirwana Resort, serta beberapa wilayah di Kota Baubau. Melalui kegiatan ini, tim melakukan pemantauan dan koordinasi guna memastikan keberadaan orang asing tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Kegiatan patroli keimigrasian ini merupakan bagian dari komitmen dalam memperkuat pengawasan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman, tertib, dan kondusif.

OPTIMALISASI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI RAHA MELALUI MONITORING DAN KOORDINASI LINTAS LOKASI

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian di wilayah Raha, telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan koordinasi pada tanggal 13–16 Mei 2026 di beberapa lokasi strategis, meliputi Polres, Hotel Nes Inn, Hotel DJ, serta kawasan wisata Danau Napabale.

Kegiatan ini dilakukan untuk memantau potensi keberadaan warga negara asing serta memperkuat koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan keimigrasian di wilayah kerja. Selain itu, pengawasan juga difokuskan pada area penginapan dan destinasi wisata yang berpotensi menjadi lokasi kunjungan maupun tempat menginap warga negara asing selama masa libur panjang.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta pengawasan keimigrasian yang lebih optimal, terintegrasi, dan mampu mendukung stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Raha dan sekitarnya.

